



Implementasi Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Banjar Dalam Upaya Pengendalian Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Di Kota Banjar

Iis Meilia

Universitas Galuh

Email : imeilia76@gmail.com

Abstract Foot and Mouth Disease (FMD) is an old disease that has reappeared. In early 2022, FMD entered Banjar City with a fairly massive attack on beef cattle. Although the mortality rate was low, yet it was very detrimental economically for breeders and livestock businessman. Especially before the feast of sacrifice. In response to these conditions, the government of Banjar City, according to their authority and inseparable from the regulations related to FMD control from the central government, has made various efforts to reduce the number of spreads and take preventive actions. These efforts is carried out with the relevant stakeholders including community participation and breeders. This study aims to describe, know, and portray as well as analyze, and also explain the supporting factors and obstacles in the implementation of the policy strategy implemented by the City of Banjar. This study uses informants as the source of information and data, and documentation so that the results of the study obtain that communications, resources, dispositions, also bureaucratic structure of the technical implementers and related administrative officials has ran quite well, although it is still based on the existence of incentives. However, for the related implementers stakeholders and public, of the four aspects mentioned, not all as expected, because of sectoral ego reasons or because of a different scientific backgrounds, so that they make different understandings. The results of the study and analysis show that the implementation of the FMD control policy strategy in the city of Banjar is running according to its objectives.

Keywords: Foot and Mouth Disease (FMD), Strategy Implementation, Policy, Control, Mortality, Implementer

Abstrak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit lama yang muncul kembali. Diawal tahun 2022, PMK masuk ke Kota Banjar dengan serangan yang cukup masif. kepada sapi potong. Meskipun tingkat mortalitas rendah namun sangat merugikan secara ekonomi bagi peternak dan pelaku usaha peternakaan. Terlebih menjelang hari raya kurban. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Banjar sesuai kewenangannya dan tidak terlepas dari peraturan terkait pengendalian PMK dari pemerintah pusat, telah melakukan berbagai upaya menekan angka penyebaran dan melakukan langkah pencegahan. Upaya ini dilakukan bersama stakeholders terkait termasuk partisipasi masyarakat dan peternak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengetahui, dan menggambarkan sekaligus menganalisa dan menjelaskan faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi strategi kebijakan yang di jalankan oleh Kota Banjar dalam upaya pengendalian PMK dengan menggunakan teori Edward III . Dalam penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber informasi dan data serta dokumentasi sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada implementor pelaksana teknis dan administrasi dinas terkait sudah cukup berjalan dengan baik meskipun masih didasari oleh adanya insentif. Namun untuk implementor stakeholders terkait dan masyarakat, dari keempat aspek tersebut tidak semua sesuai harapan karena alasan ego sektoral atau karena latar belakang keilmuan yang berbeda sehingga menjadikan pemahaman yang berbeda. Hasil kajian dan analisa bahwa implemmentasi strategi kebijakan pengendalian PMK di Kota Banjar berjalan sesuai tujuan.

Kata kunci: Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK), Implementasi Strategi, Kebijakan, Pengendalian, Mortalitas, Implementor

PENDAHULUAN

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan salah satu penyakit hewan menular strategis yang cukup menghebohkan sejak awal April 2022 silam yang kemudian ditetapkan sebagai wabah di Indonesia oleh Kementerian Pertanian sejak 7 Mei 2022. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan Status

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 2, 2023; Accepted Agustus 23, 2023

* Iis Meilia, imeilia76@gmail.com

Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak melalui Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022.

Implementasi prinsip dasar pengendalian dan pemberantasan PMK juga terus diupayakan oleh pemerintah. Berbagai kebijakan dan pedoman guna mendorong percepatan penanganan wabah PMK telah dibuat, yang meliputi: penetapan daerah wabah PMK, pembentukan gugus tugas penanganan PMK, penataan lalu lintas (hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa lainnya di daerah wabah PMK), dan penerbitan pedoman pelaksanaan kurban dalam situasi PMK. Pemerintah juga membuat rencana aksi penanganan PMK yang terbagi dalam tiga bagian, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memproses secara cepat pengadaan vaksin PMK sebanyak tiga juta dosis yang ditargetkan tercapai pada bulan Juni 2022. Vaksinasi diharapkan akan dapat berhasil memberantas PMK di Indonesia.

Adanya wabah PMK yang awalnya terjadi di daerah provinsi Jawa Timur namun secara sporadis dalam waktu singkat menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia tak terkecuali Jawa Barat termasuk Kota Banjar masuk dalam zona merah. Hal inilah menjadi perhatian khusus baik pemerintah pusat maupun daerah dan menginisiasi lahirnya regulasi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mengantisipasi dan mengurangi berkembang dan menyebarnya PMK ini.

Data pada tabel berikut memberikan informasi mengenai perkembangan PMK di Kota Banjar dan Indonesia.

Tabel 0.1

Jumlah Kematian Ternak Karena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)



(Sumber: Ditjen PKH Kementan, 2022)

Tabel 0.2

Data Perkembangan Kasus PMK di Kota Banjar

No	Wilayah	Jenis Hewan								Total	Perkembangan				
		Sapi Potong		Kambing		Domba		Kerbau			Her	Potong Bersyarat	Sembuh	Jumlah sakit	
		Terduga	Positif	Terduga	Positif	Terduga	Positif	Terduga	Positif						
1	Banjar	Bantar	88	11	13	0	0	0	0	0	80	1	8	71	0
		Mekarsari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bakokang	82	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	82	0
		Nagasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sihatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cibereum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Punwahaja	Jagawar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Punwahaja	83	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	83	0
		Rahaja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Karangnimbang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Paturunan	Makarya	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	4	0
		Paturunan	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	1	14	0
		Mulyasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Karyasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bahawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sukamukti	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	4	0
4	Langensari	Hogean	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bisangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Simatangjung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Langensari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wardingsari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Muktasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			206	11	13	0	0	0	0	0	200	1	10	189	0

Dari data di atas, kasus PMK diawal masuknya di Kota Banjar menunjukkan bahwa penyebaran wabah sangat cepat terutama pada sapi potong. Kondisi ini sangat berpotensi mempengaruhi pada perekonomian masyarakat terutama peternak apalagi pada saat menjelang Idul Kurban. Apalagi jika melihat potensi Kota Banjar yang merupakan wilayah perbatasan dengan wilayah Jawa Tengah, merupakan jalur lalu lintas ternak dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke arah Jawa Barat, dan pola perdagangan bandar sapi di Kota Banjar yang sangat erat berhubungan dengan bandar sapi yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Beberapa regulasi telah dibuat oleh pemerintah pusat dalam rangka menanggulangi wabah PMK setelah dikeluarkannya peraturan tentang penetapan status wabah PMK, kemudian ditetapkan upaya pencegahan dan pengendalian wabah PMK dalam bentuk peraturan dan surat edaran yaitu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510 Tahun 2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) dan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK. 300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak. Untuk kebijakan di level pemerintah daerah Kota Banjar mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan kebijakan sebagai landasan hukum dan landasan operasional yang telah ditetapkan khususnya kebijakan pengendalian PMK di Kota Banjar, harapan pemerintah dapat diimplementasikannya program sesuai kewenangan-kewenangan msing-masing pusat maupun daerah, Selain itu, dengan adanya kebijakan dapat terbentuk jejaring koordinasi dan komunikasi seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam implementasi program.

Dalam implementasi kebijakan adalah bagian yang tidak mudah karena akan ada banyak halangan, rintangan, permasalahan, dan intervensi dari dalam ataupun luar. . Begitupun dengan implemtasi kebijakan pengendalian PMK di Kota Banjar. Untuk mengetahui perjalanan

pelaksanaan pengendalian PMK di Kota Banjar dan capaian implementasi kebijakan ini maka perlu dilakukan kajian. Hariadi (2005:13) mendefinisikan implementasi dianggap sebagai tahap yang paling sulit mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan awal. Hal ini juga selaras dengan pendapat Grindle yang diulas dalam disertasi Resmawan E (2015:38), bahwa isi kebijakan yang baik bisa gagal pada tahapan implementasi manakala tidak didukung oleh faktor konteks (lingkungan) yang melingkupi kebijakan tersebut.

Merujuk pada Teori Implementasi Kebijakan Publik yang diperkenalkan oleh George Edward III, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, yaitu aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang melingkupi sebuah kebijakan. Gambaran tentang bagaimana aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku di Kota Banjar akan menjadi feedback atau umpan balik dalam evaluasi kebijakan sehingga akan membantu dalam upaya peningkatan kinerja pengendalian penyakit Mulut dan Kuku di Kota Banjar. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian dalam pelaksanaan tentang Implementasi Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku di Kota Banjar.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Manajemen dan Manajemen Pemerintahan

Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Kholis (2014) dalam Agustina, WSA. (2019) mengartikan manajemen sebagai kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dengan memanfaatkan orang lain (*getting things done through the effort of other people*), secara efisien dengan teknik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Sedangkan manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Strategi dan Kebijakan

Menurut Hitt, M. (1997:137), strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Sebagai organisasi yang berkaitan dengan operasional pelayanan dalam

pemerintahan, pemahaman kebijakan menurut Masriani (2017;4), menyebutkan:

“Keputusan yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga yang mempunyai berwenang untuk memecahkan suatu masalah atau mewujudkan tujuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Kebijakan pemerintah sebagai bentuk dari pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan tanpa kecuali”.

Selanjutnya Wibawa. S. (1994;53) menyatakan bahwa kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Ketiga komponen tersebut berkenaan dengan kepentingan publik sebagai sumber penentuan kebijakan publik.

Implementasi Kebijakan

Secara singkat, implementasi bermakna, menerapkan, mempraktekan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. Dalam bahasan penelitian ini, kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan publik yang merupakan bagian dari kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah merupakan hasil dari suatu kebijakan berupa kebijakan pemerintahan misalnya kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, keputusan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota

Kebijakan publik dapat berbentuk kebijakan pemerintahan misalnya kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, keputusan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Pengertian tersebut didukung oleh pendapat Mazmanian dan sabatier dalam Wahab, A. (2011;68) yang menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang- undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sehingga implementasi kebijakan dalam pengertian luas merupakan tahap dari proses kegiatan segera setelah penetapan undang-undang.

Dalam setiap implementasi kebijakan akan ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang telah digariskan sehingga mengganggu efektivitas sebuah kebijakan. Tentunya, sebuah perumusan perencanaan dalam menyusun kebijakan sangat penting. Perbedaan dalam hal kewenangan dimana pemerintah pusat cenderung memandang implementasi kebijakan sebagai suatu upaya dari pejabat atau lembaga pada pemerintahan daerah untuk merubah perilaku kelompok sasaran (masyarakat) sesuai program yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, perhatian pemerintah pusat lebih terfokus pada sejauh mana sasaran (tujuan) kebijakan dapat dicapai, serta alasan tercapainya atau tidak tercapainya sasaran (tujuan) kebijakan tersebut.

Sementara itu pada sisi lain pejabat di lapangan lebih memfokuskan perhatian mereka pada perilaku pejabat dan instansi di lapangan dalam upaya menanggulangi berbagai gangguan yang terjadi pada wilayah kerjanya, yang disebabkan oleh usaha dari pejabat lain diluar instansi tersebut demi berhasilnya suatu kebijakan baru (Resmawan E, 2015;32).

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dalam Leo (2006;79) ini dikenal dengan “Direct and Indirect Impact on Implementation”. Teori tersebut dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul “Implementing Public Policy”. Edwards III, mengemukakan teori tentang empat faktor (variable bebas) yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Intinya, implementasi kebijakan dimaksudkan mengukur akan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang dilaksanakan dilapangan oleh para implementator dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun stakeholder. Perlu ditekankan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana dilingkungan pemerintahan, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan.

Dari pemikiran tersebut dapat kita pahami bersama bahwa begitu pentingnya dan diperlukannya dimensi implementasi sebuah produk kebijakan terutama dalam menghadapi suatu ancaman atau gangguan, maka hal utama yang harus diperhatikan adalah bahwa :

1. Mereka yang akan mengimplementasikan suatu keputusan seharusnya mengetahui yang mereka laksanakan;
2. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi, harus ditransmisikan kepada petugas atau tim yang tepat sesuai sasaran dan arahan kebijakan;
3. Jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, maka produk kebijakan itu tidak sekedar dapat diterima tetapi jelas apa yang menjadi sasaran dan arahan kebijakan itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penelitian yang digunakan ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok . Dalam penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber informasi dan data serta dokumentasi untuk dapat mendeskripsikan, mengetahui, dan menggambarkan sekaligus menganalisa dan menjelaskan faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi strategi kebijakan yang di jalankan oleh Kota Bnajar dalam upaya pengendalian PMK dengan menggunakan teori Edward III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan telah ditetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak melalui Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 47 Tahun 2022 maka memicu pemerintah untuk melakukan langkah preventif dan kuratif terhadap PMK karena adanya dampak yang cukup besar akibat Penyakit ini. Dikeluarkannya peraturan-peraturan ini dimaksudkan untuk menggiatkan upaya kewaspadaan, kesiapsiagaan dan pengawasan di tingkat daerah agar dapat menekan penyebaran PMK. Masifnya penyebarana PMK mengharuskan pergerakan pencegahan dan pengendalian sesegera mungkin disemua lini. Dalam penelitian ini menjelaskan langkah strategi inisiatif serta hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan stretgi dalam menekan penyebaran PMK dan mengendaliannya untuk tidak sampai mewabah.

Sejak bulan Mei 2022 wabah PMK telah menyebar di beberapa wilayah Indonesia, termasuk salah satunya di Kota Banjar.

Gambar 4.2

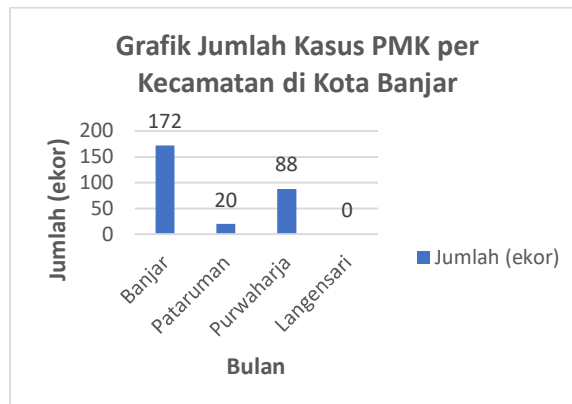
Peta Sebaran Penyakit Mulut dan Kuku di Kota Banjar



(Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Penanggulangan PMK Di Kota Banjar)

Gambar 4.3

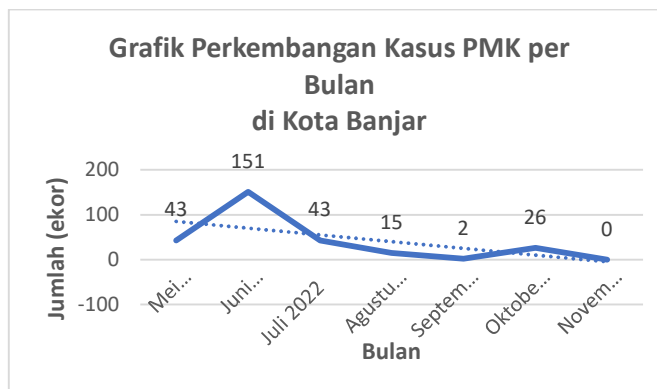
Grafik Jumlah Kasus PMK per Kecamatan di Kota Banjar



(Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Pengendalian PMK di Kota Banjar, 2022)

Gambar 4.4

Grafik Perkembangan Kasus PMK per Bulan di Kota Banjar



(Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Pengendalian PMK di Kota Banjar, 2022)

Dalam rangka upaya pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Banjar diperlukan langkah - langkah strategis pencegahan dan pengendalian yang serius melalui kerjasama dan koordinasi yang baik serta tindakan langsung di lapangan. Langkah - langkah strategi baik secara administratif maupun strategi teknis yang telah dilakukan, diantaranya :

- A. Strategi Administratif, diantaranya telah melaksanakan :
1. Pelaporan kepada Walikota terhadap hasil monitoring dan investigasi PMK;
 2. Penunjukkan dan penguatan peran Pejabat Otoritas Veteriner tingkat daerah;
 3. Surat Intruksi Kepala Dinas Kepada Seluruh Kepala UPTD Wilayah Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan : Peningkatan Kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku
 4. Surat Intruksi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kepada Kepala UPTD UPTD Rumah Potong Hewan, Kesehatan Hewan dan Perlindungan Tanaman terkait Pemetongan di RPH;
 5. Surat Edaran : Prosedur Operasional Baku (Standar Operational Procedure/SOP) Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Peka Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Keluar dan Masuk Wilayah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat;
- B. Strategi Teknis yang telah dilaksanakan adalah :
1. Penetapan Satgas PMK dan Hotline PMK;
 2. Pengetatan jalur perdagangan ternak dan pengawasan lalu lintas bekerjasama dengan Check Point milik provinsi Jawa Barat yang erada di Kota Banjar;
 3. Peningkatan pengetahuan dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Vaksinasi termasuk Pendataan dan Penandaan

- (Eartag);
5. Biosecurity;
 6. Testing;
 7. Investigasi, Surveillens dan Pengobatan, dan
 8. Potong bersyarat.

Pendekatan Teori dengan Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan

Menurut Syukur dalam Irawan, B dan Prihatmanto, (2016;13)mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu :

- a) Adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan;
- b) kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan;
- c) menerapkan elemen (pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggungjawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.

Tabel 4.3

Sasaran Kelompok dan Pelaksanan pada Kegiatan Pengendalian PMK di Kota Banjar

No	Unsur Proses Implementasi	Uraian
1	Program	Percepatan Pencegahan dan Pengendalian PMK di Kota Banjar
2	Sasaran Kelompok	Masyarakat konsumen panga nasal hewan, peternak/kelompok ternak, pelaku usaha peternakan (bandar ternak, pedagang kios daging)
3	Pelaksana	Tim Perencana, Tim KIE, Tim Teknis Penanganan dan Pengendalian Penyakit (Medik dan Paramedik Veteriner), Tim Monev (terdapat pada SK Satuan Tugas Pengendalian PMK pada Dinas Ketahanan

	Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar)
--	--

Analisa dan Telaah Penelitian dengan Teori Implementasi Kebijakan

Kegiatan wawancara dengan informan untuk menggali informasi dari informan penelitian berkenaan dengan implementasi strategi kebijakan dalam menangani pengendalian PMK di Kota Banjar. dan akan dikaitkan dengan landasan teori dari Edward III mengenai implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.. Dalam penelitian ini memfokuskan kepada bentuk strategi yang dilakukan serta hambatanya.

a. Komunikasi

Indikator keberhasilan sebuah komunikasi yaitu proses pemindahan informasi secara jelas dan terperinci atau transmisi/penyaluran baik dari atas ke bawah maupun sejajar bahkan dari bawah ke atas.

Strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pengendalian PMK adalah:

1. Membentuk jejaring komunikasi

Bentuk komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi yang terjadi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan secara internal terjadi antar pejabat dalam dinas yaitu pejabat struktural lingkup dinas ,dengan pelaksana teknis dan pelaksana administrasi. Komunikasi internal ini disampaikan dalam bentuk formal seperti rapat teknis lingkup dinas, rapat teknis lingkup bidang terkait, diskusi internal dengan pelaksana teknis dan non-formal seperti perintah langsung atasan kepada bawahan.

Tabel 4.4

Bentuk Komunikasi Pengendalian PMK pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Banjar

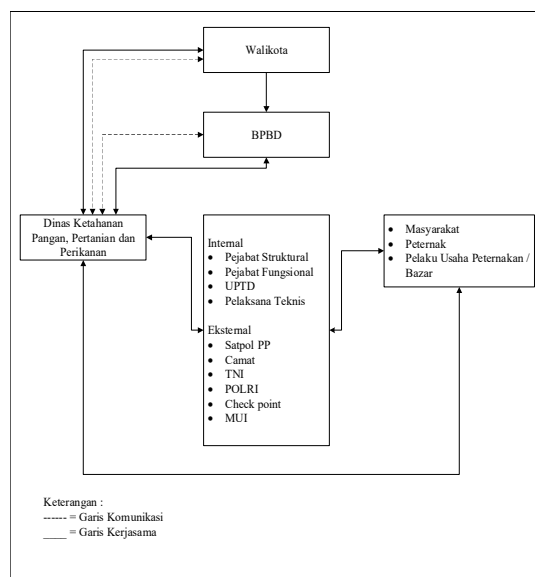
Komunikasi	Pelaku	Bentuk
Internal	Pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana teknis, UPTD lingkup dinas (SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar)	Rapat Teknis, pertemuan/ diskusi internal, Surat Edaran Kewaspadaan PMK, spanduk, leaflet, SOP Teknis
Eksternal	BPBD, Diskominfo, Kecamatan, MUI, TNI, POLRI, aparat desa,	Sosialisasi, Rapat Koordinasi Tk. Kota Banjar,

	Peternak, pelaku usaha, media cetak dan elektronnik	Surat Edaran Kewspadaan PMK, Hotline Pengendalian PMK, spanduk, leaflet,
--	---	--

2. Perkuat Kerjasama Lintas Sektoral

Dalam tahap komunikasi, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan juga melakukan kerjasama dengan perangkat daerah lain dan dengan sektor umum atau swasta. Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, kerjasama daerah bisa dilakukan antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya atau antara pemerintah daerah dan pihak ketiga. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kinerja dinas dalam pengendalian PMK di Kota Banjar.

Diagram 4.1
Garis Komunikasi dan kerjasama Pengendalian PMK di Kota Banjar



(Sumber: Peneliti, 2023)

Garis komunikasi di atas merupakan suatu proses penyampaian atau transmisi informasi. Transmisi yang terjadi cukup baik menurut telaahan penelitian karena terbukti dengan adanya garis komando pengendalian PMK seperti pada tabel di atas, dilihat dari pendeknya jalur birokrasi dan dinsa teknis dapat langsung berkoordinasi dan berkomunikasi dengan sasaran program. Indikator selanjutnya adalah dapat dinilai dari respon masyarakat, peternak dan pelaku usaha terhadap tanggapan dan pemahaman langkah preventif PMK pada

ternak yang terinfeksi. Umumnya, sebagian peternak sudah mengetahui tentang penanganan PMK dan pelaporan jika terdapat ternak yang menderita PMK. Namun ada pula sebagian kecil masyarakat dan peternakn belum paham secara menyeluruh tentang PMK. Hal ini dimungkinkan karena peternak memang kurang peduli dan tidak membaca selebaran yang diberikan petugas meskipun sudah diberikan pengarahannya atau leaflet. Diakui kelemahan ini salah satunya karena kurangnya intensitas komunikasi dengan peternak atau bandar.

Kejelasan informasi yang disampaikan melalui komunikasi, merupakan hal yang penting karena dengan informasi yang jelas tidak akan menimbulkan persepsi yang lain antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dan penerima manfaat kebijakan. Selain itu, kejelasan informasi juga bermanfaat dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan dapat seefektif mungkin dan tepat sasaran.

Indikator selanjutnya dalam komunikasi yaitu konsistensi. Konsistensi berarti kesinambungan informasi dan jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi dengan optimalisasi komunikasi melalui pembentukan jejaring komunikasi dan penguatan kerjasama lintas sektoral yang terjadi dalam implementasi strategi kebijakan pengendalian PMK sudah cukup berjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi sudah cukup jelas dan konsisten dengan kemampuan beberapa pelaksana kebijakan atau implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga cukup seragam pemahamannya. Namun tidak semua implementor. Sehingga komunikasi harus tetap terus dilaksanakan. Dari wawancara yang menyebutkan pernah terjadi kesalahpahaman selama pelaksanaan di lapangan dan respon beberapa masyarakat atau peternak dan pelaku usaha beragam dan dinilai cukup baik karena dapat melakukan tindakan pencegahan dan penanganan dini serta pelaporan. Tetapi belum semua menerapkan sesuai anjuran. Namun, untuk strategi kerjasama melibatkan stakeholders atau lintas sektor sudah cukup berhasil karena adanya keterlibatan dan sinergi kegiatan yang baik dalam setiap kegiatan tetapi tidak semua. Hal ini dapat dilihat dari diagram garis komunikasi dan kerjasama dalam pengendalian PMK di Kota Banjar di atas dan komunikasi berjalan secara vertikal dan horizontal

b. Sumber Daya

Ketiadaan atau ketidaklengkapan sumber daya atau kurang optimalnya potensi sumber daya akan berakibat ketidakefektifan penerapan kebijakan.

1. Sumber daya manusia (SDM)

Untuk SDM dapat digolongkan menjadi tenaga teknis dan tenaga administrasi. Untuk tenaga teknis khusus seperti dokter hewan dan paramedik veteriner masih belum cukup meng-cover luas dan banyaknya ternak yang ada di Kota Banjar. Kota Banjar memiliki 4 kecamatan

dan 136 desa sehingga dengan hanya memiliki tenaga teknis di lapangan sebanyak 18 orang. Sementara jumlah populasi ternak di Kota Banjara seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 0.1
Populasi Ternak di Kota Banjar

Jenis ternak	Jumlah Ternak di Kota banjar				Total (Ekor)
	Kecamatan Banjar	Kecamatan Purwahaerja	Kecamatan Pataruman	Kecamatan Langensari	
Sapi	134	124	180	248	686
Kerbau	0	0	0	3	3
Domba	242	467	189	197	1.095
Kambing	36	39	0	1.002	1.077

(Sumber: Rekap Data Dinas per Bulan September, 2022)

Strategi kebijakan yang diterapkan adalah dengan pengoptimalan pegawai dijadikan pemecahan atas hambatan tersebut cukup berhasil. Pengoptimalan pegawai dimaksud adalah dengan melibatkan pegawai dari seksi yang lain dan dari Penyuluh Pertanian.

2. Sumberdaya Anggaran/Finansial

Dari pengetahuan peneliti yang juga merupakan pegawai disimpulkan bahwa untuk pendanaan pelaksanaan program pengendalian PMK di masa awal masuknya ke Kota Banjar tidak tersedia secara khusus untuk program tersebut. Keterbatasan anggaran untuk pengendalian PMK di awal penyebaran PMK di Kota Banjar, maka dilakukan penguatan anggaran dari APBD Kota Banjar yaitu Rp. 260.466.000,00 yang didasari oleh adanya Kejadian Luar Biasa (KLB). Dukungan anggaran ini meliputi pemenuhan sarana penunjang kegiatan. Serta dari provinsi maupun pusat dalam bentuk alokasi sarana pendukung seperti obat-obat hewan dan vaksin PMK dan operasional kegiatan.

Implementasi kebijakan telah dilaksanakan namun masih banyak yang perlu disempurnakan. Terlebih dalam kontinuitas atau keberlanjutan program ketika pendanaan dari provinsi atau pusat telah berkurang atau sudah tidak ada. Jika tidak ada kolaborasi sangat sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga ketersediaan anggaran perlu diperhatikan

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Tiga aspek dalam disposisi yang menentukan tingkat kepatuhan yang dimanifestasikan dengan tindakan atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pengendalian PMK di Kota Banjar, yaitu:

- a) Efek disposisi, berupa kepatuhan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan;

- b) Staffing birokrasi, berkenaan dengan pengangkatan para pelaksana dalam posisi-posisi yang menentukan pembagian yang disesuaikan dengan tugas personil;
- c) Insentif berupa penghargaan yang diberikan kepada pelaksana di lapangan.

Hasil wawancara disebutkan pelaksana teknis mendapatkan insentif berdasarkan capaian kinerjanya yang sumber insentif tersebut dari APBN yang diajukan terlebih dahulu berdasarkan capaian target yang telah dilaksanakan. Pemberian insentif atau operasional pada pelaksana teknis kegiatan terdapat tiga bentuk, yaitu insentif untuk kegiatan vaksinasi PMK, kegiatan Penandaan Ternak dan Pengambilan Sampel Ternak yang sudah di vaksin PMK.

Menyimpulkan dari hasil wawancara, pengaruh insentif terhadap kinerja pelaksana, bahwa dengan adanya insentif sangat mempengaruhi etos kerja, kewajiban dan komitmen di lapangan meskipun sangat banyak dan padat kegiatan pengendalian PMK di lapangan. Pelaksana teknis dapat menjalankan instruksi sesuai petunjuk teknis atau SOP yang dibuat dan dilakukan bahkan di hari libur atau hingga larut malam. Kecenderungan sikap positif ini menandakan pelaksana bertanggungjawab terhadap tugas yang diemban meskipun sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya insentif yang dapat dilihat dari tanggung jawab/komitmen aparat dalam melaksanakan tugasnya. Namun dalam pemberian sanksi tidak diberlakukan karena memang tidak terjadi kesalahan yang fatal dan masih bisa ditolerir seperti keterlambatan kumpul untuk mulai berangkat ke lapangan atau susah dihubungi dalam kaitannya dengan pengkoordinasian dan sanksi dirasa tidak perlu diterapkan.

Tabel 4.6
Hasil Vaksinasi PMK di Kota Banjar

No	Alamat	SAPI POTONG		
		Target Vaksin Dosis I	Target Vaksin Dosis II	Realisasi
	KEC BANJAR			
1	Banjar	39	31	70
2	Balokang	116	61	177
3	Jajawar	0	0	0
4	Cibeureum	24	6	30
5	Situbatu	23	17	40
6	Neglasari	3	3	6
7	Mekar Sari	0	0	0

	J U M L A H	205	118	323
	KEC PURWAHARJA			
1	Purwaharja	67	71	138
	Karang		0	
2	Panimbal	0		0
3	Raharja	19	11	30
4	Mekar Harja	20	12	32
	J U M L A H	106	94	200
	KEC PATARUMAN			
1	Pataruman	36	20	56
2	Hegarsari	31	22	53
3	Binangun	36	21	57
4	Sukamukti	25	16	41
5	Batulawang	30	35	65
6	Karyamukti	12	10	22
7	Mulyasari	0	2	2
8	Sinar Tanjung	4	0	4
	J U M L A H	174	126	300
	KEC LANGENSARI			
1	Langensari	29	16	45
2	Waringin Sari	57	28	85
3	Muktisari	30	23	53
4	Rejasari	36	31	67
5	Bojongkantong	40	20	60
6	Kujangsari	56	29	85
	J U M L A H	248	147	395
JUMLAH TOTAL		733	485	
TOTAL DOSIS VAKSINASI SAPI POTONG				1218

(Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Pengendalian
PMK di Kota Banjar, 2022)

d. Struktur Birokrasi

Wali Kota Banjar membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan dan Pengendalian PMK Tingkat Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari beberapa unsur. Menelaah dari surat keputusan tersebut bahwa dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan atau berkoordinasi dengan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam koordinasi ini disebutkan

keterlibatan unsur TNI, POLRI dan BPBD.

Dalam rangka untuk keseragaman tindakan dari para pelaksana, menyederhanakan proses pembuatan keputusan-keputusan, mengefektifkan proses pelaksanaan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada dibuat SOP Pengendalian PMK. Hal ini bertujuan agar para implementor dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan di lapangan. Oleh karena itu disusun fragmentasi tugas yakni pembagian tanggung jawab untuk setiap divisi di antara unit-unit organisasional.

Mengenai fragmentasi dapat dilihat dari pembagian tugas yang tercantum pada SK. Dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian atau divisi, seksi serta unsur-unsur pelaksana kebijakan dimaksudkan dapat mengurangi timbulnya hambatan-hambatan yang berkaitan dengan koordinasi dan teknis pelaksanaan sampai kepada tahap pelaporan dengan pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hasil pengamatan peneliti akui memang tidak mulus masih ada kendala- kendala yang dihadapi, baik dari aspek internal maupun dari eksternal organisasi maupun masyarakat.

Analisa dan Telaah Penelitian terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat

Tabel. 11

Matriks Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Adanya pembentukan Satuan Tugas Pengendalian PMK Tingkat Kota Banjar sesuai dengan SK Walikota Banjar Nomor:524/246/2022 tentang Pembentukan Tim Satgas Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Banjar dan Adanya Satuan Tugas Pengendalian PMK sesuai dengan SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Nomor: P/534/520/DKPPP/III/2022 tentang Pembentukan Tim Satgas Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Kurangnya dukungan dana pelaksanaan kebijakan;

Pelaksana dengan keahlian dalam bidang IT;	Tidak optimalnya perhatian dari pemerintah lokal (setempat) seperti dari pemerintah desa sebagai sarana transformasi informasi kebijakan;
Keberadaan Check Point milik Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat yang berada di Kota Banjar;	Masih ditemukannya rendahnya respon masyarakat khususnya pelaku usaha peternakan terhadap penanganan PMK dengan mambawa masuk ternak yang terindikasi sakit hasil pembelian dan tanpa disertai srat keterangan sehat dari wilayah asal ternak atau dengan kata lain secara bebas memasukkan ternak dari luar Kota Banjar;
Penyuluh pertanian masih dalam naungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Kontrol dan pengawasan lalu lintas ternak masih rendah;
Dukungan sektor internal cukup baik	Kurangnya dukungan pihak desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai pendekatan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian PMK di Kota Banjar dinilai cukup mendukung dan berdampak positif pada implelementasi kebijakan sehingga dapat berjalan sesuai target yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan capaian hasil vaksinasi PMK dan penandaan ternak telah sesuai dengan target provinsi. Di samping itu, wabah PMK dapat dilokalisir sehingga tidak semua ternak terkena PMK.

1. Komunikasi secara vertikal yakni antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan Walikota atau Sekretaris Daerah dan dengan pemerintah yang ada di atasnya seperti pemerintah provinsi dan pusat berjalan dengan baik.
2. Komuniaksi secara horizontal dengan stakeholders terkait seperti dengan BPBD, Satpol PP, Kecamatan, MUI, dengan perangkat desa, BPD dan masyarakat, peternak dan pelaku usaha peternakan atau bandar ternak kurang maksimal.;
3. Informasi dapat bersumber dari pemerintah daerah dan pusat serta berasal dari TV,

Internet dan media sosial dan elektronik,

4. Keterbukaan dan kemudahan akses memperoleh informasi dari pemerintah daerah dirasa cukup mudah dan dibuat mudah.
5. Sinergi kegiatan masih dihiasi ego sektoral dan adanya kepentingan lain. Hal ini diperlihatkan dengan ditemukannya adanya ketidaksinkronan pendapat atau keinginan dan hasil;
6. Struktur Birokrasi terbentuk dari instruksi pemerintah pusat yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan kebijakan penanganan dan pengendalian PMK membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan dan Pengendalian PMK di Kota Banjar yang keterlibatan personilnya mencakup unsur TNI dan POLRI;
7. Sudah ada fragmentasi dengan pembagian tugas dan kewenangan bagi semua unsur terkait;
8. Sumberdaya yang digunakan pemerintah daerah bersumber dari APBD dan penguatan anggaran dari APBN dan APBD I;
9. Pemetaan pelaksana teknis pengendalian PMK telah dibagi berdasarkan kewenangan dan kompetensi serta keahlian. Dari aspek sumberdaya manusia memang belum ideal;
10. Kecenderungan sikap pelaksana yakni implemetor atau stakeholders terkait tidak semua konsisten dan terdapat yang susah berkoordinasi meskipun pada akhirnya mengikuti kegiatan sesuai yang diinstruksikan. Hal ini didorong dengan adanya insentif. Namun demikian, secara keseluruhan tergolong cukup baik. Untuk sikap pelaksana lainnya yaitu masyarakat, peternak, pelaku usaha peternakan terbagi dalam dua golongan yaitu golongan respon positif dan golongan respon negatif. Untuk golongan respon positif, mereka dapat melakukan sesuai instruksi atau himbauan dan proaktif dalam kegiatan teknis pengendalian PMK. Sedangkan untuk golongan respon negatif, mereka bersikap apatis, sulit untuk menerapkan sesuai himbauan. Hal yang melatarbelakangi adalah dari segi penguasaan pemahaman terhadap PMK atau dari dalam dirinya sendiri.

SARAN

1. Dalam upaya menjaga keberlanjutan aspek komunikasi antar stakeholder atau pelaksana dan menjaga sikap pelaksana dalam tahap pencegahan dan pengawasan kemunculan kembali PMK, maka sebaiknya pemerintah daerah melalui dinas terkait mengalokasikan anggaran untuk rapat teknis berjangka dan untuk operasional pencegahan PMK untuk menjaga komitmen pelaksana dan penguatan serta pengembangan aspek komunikasi. Diharapkan juga tetap tersedia layanan pengaduan atau Hotline PMK;

2. Pada aspek struktur birokrasi perlu ditata ulang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dinamis, sehingga satuan tugas yang telah terbentuk dapat dinamis juga jika memungkinkan memasukkan unsur desa sebagai kontrol pertama dalam pengawasan mobilisasi ternak;
3. Dalam memaksimalkan penggunaan sumberdaya yang ada dalam pengendalian PMK khususnya sumberdaya finansial maka diharapkan dengan pemerintah desa dapat berkolaborasi anggaran melalui anggaran desa;
4. Sebagai rekomendasi dalam penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif terutama yang menyangkut pengembangan dan model kerjasama lintas sekrola dalam rangka pengembangan aspek komunikasi yang di lapangan sangat kompleks, disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, WSA.(2019), Implementasi Manajemen Strategi Di Smpn Satap 2 Tellu Limpoe Bone Sulawesi Selatan,Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Tesis.
- Hariadi, B. 2005. *Strategi Manajmene*. Jakarta: Bayu Media Publishing.
- Irawan. B dan Prihatmanto. 2016. *Implemetasi Kebijakan Pelayanan Statistik Terpadu Di Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen. STIAMI.
- Leo. A. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabet.
- Masriani. 2017. Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-anak Pengemis di Kecamatan Mandau), Universitas Riau. JOM Fisip Vol.4 No.2.
- Resmawan. E. 2015. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Bandar udara dan Jalan di Kabupaten Malinau*. Disertasi. Makasar. Universitas Hasanudin.
- Wahab, dan Solichin. (1997), *Evaluasi Kebijakan Publik*. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP. Malang.
- Wibawa. S. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Intermedia.
- Wheelen, Thomas L And J, David Hunger. 2003. *Strategic Management and Business Policy*. Nine Edition, Pearson Education, New Jersey.